

# **RENCANA AKSI TA 2021**

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA  
TENGGARA**





## KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu dasar atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2021 kedepan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang berlandaskan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di dalam peningkatan keefisienan, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tahun tahun selanjutnya.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan  
Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara,



**Ir. Muhammad Nur, M.S.P**



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2021 adalah dokumen rencana aksi tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan. Tiga Program turunan yang diemban Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terutama dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia antara lain Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2021, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

### **I.I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2021 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

### **I.II. LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/PHLHK/SET.10/SET.1/10/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;

**BAB II. RENCANA AKSI**

Sesuai dengan perjanjian kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara TA 2021, telah disampaikan bahwa kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam TA 2021 mempunyai target yang tertuang dalam Rencana Aksi antara lain:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET 2021
<b>Program : Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
Terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 Orang
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	135 Perusahaan
Terselesaikannya Kasus Pidana LHK sampai dengan P21	Peningkatan Kapasitas PPNS LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4 Orang
	Kasus pidana LHK diselesaikan sampai dengan P21	Perkara Hukum	32 Perkara
<b>Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>			
Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Operasi Bidang Keamanan	24 Operasi
	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60 Orang
<b>Program : Dukungan Manajemen</b>			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan



### **BAB III. PENUTUP**

Tercapainya sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tidak lepas dari dukungan oleh Seksi Wilayah dan beberapa Pos Pengaduan yang berapa di tingkat tapak. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program yang diemban oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan yang sebaik- baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan kegiatan, program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.



## **BAB IV.**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**TABEL 1 - PROGNOISIS CAPAIAN PROGRAM PER TRIWULAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TA 2021**

Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Target 2021	Satuan
		I	II	III	IV		
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	-	-	-	5	Orang
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	22	43	49	21	135	Perusahaan
Peningkatan Kapasitas PPNS LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	2	-	-	4	Orang
Kasus pidana LHK diselesaikan sampai dengan P21	Perkara Hukum Perseorangan	8	8	8	8	32	Perkara
Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Operasi Bidang Keamanan	3	9	9	3	24	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60	-	-	-	60	Orang
Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	Layanan Perkantoran	0,24	0,50	0,76	1	1	Layanan (*)
	Layanan Umum	0,24	0,50	0,76	1	1	Layanan (*)

Keterangan :

(\*) = Akumulatif





**TABEL 2 PROGNOISIS CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TA 2021**

Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Bulan ke-												Satuan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Orang
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6	8	8	14	16	13	18	17	14	14	7	-	Perusahaan
Peningkatan Kapasitas PPNS LHK	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Orang
Kasus pidana LHK diselesaikan sampai dengan P21	Perkara Hukum	-	4	4	4	3	1	-	6	2	5	3	-	Perkara
Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Operasi Bidang Keamanan	-	2	1	5	4	-	3	4	2	2	1	-	Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Orang
Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	Layanan Perkantoran	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,50	0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1	Layanan (*)



	Layanan Umum	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,50	0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1	Layanan (*)
--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	-------------

Keterangan :

(\*) = Akumulatif

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total	Satuan
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>						
<b>Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi</b>						
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Target 5 Orang)	5	-	-	-	5	Orang
Peningkatan Kapasitas PPLH	5	-	-	-	5	Orang
Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	5	-	-	-	5	Orang
Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	-	1	-	-	1	Kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Target 135 Perusahaan)	22	43	49	21	135	Perusahaan
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	22	43	49	21	135	Perusahaan
Penanganan Pengaduan Perusahaan	7	13	13	2	35	Perusahaan
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	20	50	40	10	120	Pengaduan
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	20	20	15	70	Perusahaan
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	-	10	16	4	30	Perusahaan
<b>Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>						
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Target 4 Orang)	2	2	-	-	4	Orang
Peningkatan kapasitas PPNS	2	2	-	-	4	Orang
Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	-	-	1	-	1	Perkara
Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK	2	2	-	-	4	Orang
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	-	1	-	-	1	Kegiatan
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	-	-	1	-	1	Perkara
Perkara Hukum (Target 32 Perkara)	8	8	8	8	32	Perkara
Kasus Tindak Pidana LHK P.21 Perseorangan	8	8	8	8	32	Perkara
Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	4	5	5	3	17	Perkara
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	8	8	8	7	31	Perkara
Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana Badan Usaha di wilayah DAS Citarum	-	-	2	1	3	Perkara
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK Badan Usaha di Wilayah DAS Citarum	-	-	-	1	1	Perkara
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>						
<b>Pencegahan dan Pengamanan Hutan</b>						
Operasi Bidang Keamanan (Target 24 Operasi)	3	9	9	3	24	Operasi
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2	4	4	2	12	Operasi
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	7	8	8	7	30	Dokumen
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2	3	3	2	10	Operasi
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	-	1	1	-	2	Operasi
Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	1	-	-	1	2	Sosialisasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1	5	5	1	12	Operasi
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1	4	4	1	10	Dokumen
Operasi Pembalakan Liar	1	2	1	1	5	Operasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total	Satuan
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	-	3	4	-	7	Operasi
Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	1	1	-	-	2	Kegiatan
Penguatan Sistem Intelijen	-	-	1	-	1	Laporan
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	-	-	1	-	1	Kegiatan
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Target 60 Orang)	60	-	-	-	60	Orang
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	60	-	-	-	60	Orang
Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan LHK	60	-	-	-	60	Orang
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>						
Layanan Perkantoran (Target 1 Layanan)	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Gaji dan Tunjangan	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Layanan Umum (Target 1 Layanan)	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT)	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Penyusunan rencana program, dan Penyusunan rencana anggaran	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Pengelolaan keuangan	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan
Pengelolaan Kepegawaian	0.24	0.26	0.26	0.24	1	Layanan